



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 782 /01-15/01/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Kesepakatan Aksi Bersama
Pencegahan Korupsi Dana Pendidikan

30 Januari 2015

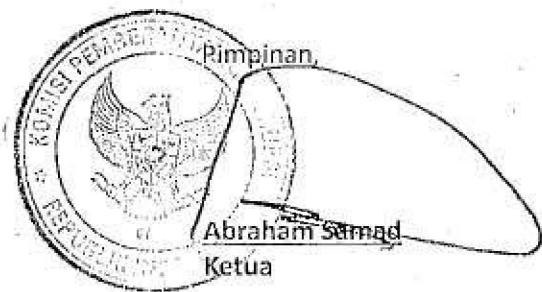
Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3. Menteri Agama
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Keuangan
6. Kepala BPKP

Sehubungan dengan telah disepakatinya aksi bersama pencegahan korupsi dana pendidikan tahun 2015 oleh 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga pada tanggal 15 Desember 2014, berikut disampaikan kesepakatan aksi bersama yang telah ditandatangani oleh seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga tersebut.

Pimpinan KPK memberikan apresiasi kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga yang sudah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Kesepakatan aksi bersama pencegahan korupsi dana pendidikan ini merupakan panduan bagi Tim Aksi Bersama 7 (tujuh) K/L untuk menyusun rincian langkah-langkah perbaikan demi mewujudkan Indonesia Cerdas Tanpa Korupsi.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Pimpinan KPK

**KESEPAKATAN AKSI BERSAMA
PENCEGAHAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN
TAHUN 2015**

Dalam rangka pencegahan korupsi dana pendidikan, maka telah disepakati aksi bersama 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai berikut:

1. Melakukan program pencegahan korupsi di Kementerian pengelola dana pendidikan dan instansi terkait di daerah	KPK (Koord), Kemdikbud, Kemristek Dikti, Kemenag
2. Melakukan kajian terkait sistem pengelolaan dana pendidikan	KPK (Koord), Kemdikbud, Kemristek Dikti, Kemenag, Kemkeu, BPKP
3. Menyempurnakan aturan pengelolaan dana pendidikan	Kemdikbud, Kemristek Dikti, Kemenag, Kemkeu, Kemdagri, BPKP
4. Melakukan monitoring dan evaluasi dana pendidikan pada: a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kemdikbud (Koord), Kemdagri, KPK, BPKP
b. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Kemristek Dikti (Koord), KPK, BPKP
c. Kementerian Agama	Kemenag (Koord), KPK, BPKP
5. Menyempurnakan dan mengintegrasikan sistem informasi pendataan pendidikan nasional pada masing-masing Kementerian pengelola dana pendidikan	Kemdikbud, Kemristek Dikti, Kemenag
6. Menyempurnakan dan mengintegrasikan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada Kementerian pengelola dana pendidikan	Kemdikbud, Kemristek Dikti, Kemenag
7. Meningkatkan kompetensi audit dari Inspektorat Daerah dalam mengawasi dana pendidikan	Kemdagri (Koord), Kemdikbud, BPKP
8. Sosialisasi kewenangan pengawasan dana pendidikan pada Pemerintah Daerah	Kemdagri

Jakarta, 15 Desember 2014

**Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan**

(Anies R. Baswedan)

**Menteri Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi**

(M. Nasir)

Menteri Agama

(Lukman Hakim Saifuddin)

Menteri Dalam Negeri

(Tjahjo Kumolo)

Menteri Keuangan

(Bambang P.S. Brodjonegoro)

Plt. Kepala BPKP

(Meidyah Indreswari)

Ketua KPK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi